

DAFTAR PUSTAKA

- BPN-RI, Pusdatin. *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*.
- BPN-RI, Pusdatin. *Efektifitas GeoKKP Untuk Pemetaan Digital*.
- Handoko, Amin. 2010. *Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Undip.
- Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, BPN-RI. 2013. *Buku Panduan Pelayanan*. Semarang : Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
- Noor, Muhammad Rukhyat. 2008. *Aspek Hukum Teknologi Digital dan Dokumentasi Pertanahan*. Jakarta.
- Pamungkas, Sepangga Ardi. 2010. *Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Hak Milik (HM) Untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : Jurusan Teknik Geodesi Undip.
- Republik Indonesia, 1997. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia, 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Republik Indonesia, 2003. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003.
- Republik Indonesia, 2005. Keputusan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia, 2006. Peraturan Presiden 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- Republik Indonesia, 2011. Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
- Republik Indonesia, 2013. Peraturan Kepala BPN RI No.2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia. 1960. *Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*
- Saputera, Rekky. 2010. *Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Milik di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.* Tesis tidak diterbitkan. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Undip.
- Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI.* Makalah disajikan pada Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri, Hotel Jayakarta, 19 September 2012.
- Swasti, I Wahyu. 2010. *Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Penguatan Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Kabupaten Sragen).* Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : Jurusan Teknik Geodesi Undip.

www.wikipedia.com